

ReportTM
Juli 2018

**Perkenalan Pengurus
APBI-ICMA Periode
2018-2021**

**Penundaan Kewajiban Penggunaan
Asuransi Nasional**



www.apbi-icma.org

ReportTM content



Hal. 3
priority **ISSUE**

Hal. 8
events

Hal. 12
OTHER ACTIVITIES

Permendag No. 48 Tahun 2018 (Penggunaan Asuransi Nasional)

Rapat Anggota terkait Permendag No. 48/2018 ini diadakan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 di Sekretariat APBI-ICMA. Rapat ini dipimpin langsung oleh Hendra (Direktur Eksekutif APBI), Adri Kurnia (Ketua 3 APBI), Fery Prasetyo (Komite Logistik APBI) dan Johnny Djajadi (Komite Logistik APBI). Rapat diadakan sebagai tindak lanjut dari pertemuan yang dihadiri oleh APBI di Kemendag. Rapat ini membahas tentang beberapa pertimbangan terkait dengan penggunaan asuransi nasional, APBI pun meninjau kembali mengenai pasal-pasal yang tercantum di Permendag No 48/2018, terutama pada pasal 4 yang terkait dengan penggunaan asuransi ini. Selanjutnya APBI akan mengirimkan surat kembali ke Kemendag terkait usulan terkait penggunaan asuransi nasional ini, dan rencananya APBI akan melakukan *press conference* terkait *issue* ini.

Pada tanggal 26 Juli 2018 diadakan rapat di ruang Rapat Dahlia Gedung 1 Lantai 1 Kementerian Perdagangan. Dalam rapat ini dilakukan pembahasan lanjutan mengenai

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Mengenai penggunaan asuransi nasional untuk kegiatan ekspor batubara dan *crude palm oil* (CPO) dengan mengundang *stakeholders* terkait, seperti APBI-ICMA, GAPKI, AAUI, Kementerian Perhubungan, OJK, Bea Cukai, dan para surveyor yang telah ditentukan oleh Kementerian Perdagangan. Rapat perdana dilaksanakan hari Kamis, 28 Juni 2018 dan rapat kedua diselenggarakan pada hari Selasa, 3 Juli 2018. Dari kedua rapat tersebut, Kementerian Perdagangan telah menyusun *business process* pelaksanaan penggunaan asuransi nasional. Para pelaku usaha juga menyampaikan beberapa kemungkinan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan tersebut yang

dianggap masih belum siap untuk dilaksanakan karena belum ada sosialisasi yang merata sampai tingkat pelaksana paling bawah. Selain itu, AAUI juga melaksanakan diskusi terkait regulasi tersebut dengan perusahaan asuransi umum di Indonesia serta mengundang APBI, GAPKI, dan OJK. Akhirnya dengan mempertimbangkan masukan dari APBI, GAPKI dan dari pihak *buyer*, Kementerian Perdagangan memutuskan untuk melakukan penundaan ketentuan penggunaan asuransi nasional untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan akan berlaku efektif 1 Februari 2019.

Penundaan pelaksanaan penggunaan asuransi nasional akan dilakukan sampai 6 bulan mendatang. Selama 6 bulan tersebut, Pemerintah berharap para pelaku usaha dapat bekerjasama untuk mewujudkan pelaksanaan regulasi itu pada tahun 2019 dengan pertimbangan konsistensi kebijakan.



Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, juga menjanjikan adanya periode percobaan aturan tersebut sebelum resmi berlaku per tanggal 1 Februari 2019. Selain itu, para pelaku usaha pertambangan batubara berharap ada kejelasan dan klarifikasi dari pemerintah terkait dengan kewajiban pelaksanaan penggunaan asuransi nasional yang tercantum dalam Permendag No. 48 Tahun 2018. Klarifikasi tersebut terkait dengan eksportir seharusnya bukanlah pihak yang dibebankan untuk melakukan kewajiban penggunaan asuransi nasional, namun kewajiban penggunaan asuransi nasional tetap berada di tangan *buyer* untuk *term* perdagangan FOB.



Ketentuan Pemenuhan Pasokan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri/ *Domestic Market Obligation (DMO)*

Pada tanggal 23 Juli 2018 diadakan rapat di kantor APBI-ICMA yang membahas beberapa isu penting antara lain membahas isu kewajiban pemenuhan *Domestic Market Obligation (DMO)*

Sehubungan dengan semakin menghangatnya isu DMO, maka APBI mengadakan rapat anggota dengan agenda pembahasan

1. Update Rekonsiliasi DMO pada tanggal 18-19 Juli 2018 di Bandung.

- Agenda pertama tentang rekonsiliasi DMO ini di update oleh perusahaan yang hadir pada acara tersebut. Oka (Adaro) dan Jhonny (Kideco) yang kebetulan hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa

acara tersebut hanya ditujukan untuk mencocokkan data antara para perusahaan yang mensupply batubara ke PLN dan sebaliknya PLN pun menyampaikan jumlah supply batubara yang diterima dari para perusahaan, disini Minerba

berusaha untuk mencocokkan semua data dan jika ada selisih maka Minerba akan menanyakan dimana miss nya dan kemana selisihnya.

- Secara keseluruhan acara di Bandung ini khusus untuk PLN tidak untuk industri lain.
- Presentasi dari pihak IMA pun mengusulkan tentang skema transfer kuota ini. IMA mengusulkan menggunakan verifikator, namun untuk skema bisnisnya sendiri IMA menyerahkan sepenuhnya B2B kepada perusahaan yang excess dan perusahaan yang kurang kuota.

- Namun poin yang perlu di catat adalah Ditjen Minerba berkomitmen bahwa transfer kuota ini harus tetap dijalankan.





2. Update Pertemuan dengan Sri Raharjo pada tanggal 20 Juli 2018

- Rapat dengan Sri Raharjo dihadiri oleh Adri K., Haryanto, Richard T., dan Hendra.

Update pertemuan ini, Sri mengatakan bahwa transfer kuota ini akan diambil alih oleh Minerba, sementara itu Dirjen sudah menyampaikan usulan APBI terkait dengan dana pungutan seperti sawit ke Menteri ESDM.

Sementara itu mengenai sanksi terkait dengan tidak terpenuhinya DMO ini, posisi Pemerintah pun belum bisa memberikan jawaban yang pasti.

3. Yang harus dilakukan APBI

- APBI akan mengirimkan surat ke Menteri ESDM terkait usulan skema dana pungutan untuk transfer kuota ini seperti dana

pungutan sawit, dan skema ini harus sudah benar benar matang ketika dilampirkan ke Menteri.

- APBI akan mengadakan courtesy call dengan Menteri ESDM. APBI akan menanyakan terkait dengan SE Menteri ESDM tanggal 13 Juli 2018 terkait dengan yang dimaksud DMO ini dan memperjelas kalimat yang menyatakan "pemenuhan DMO dimaksud 80% diperuntukan bagi pembangkit listrik untuk kepentingan umum (PLN/IPP)" karena masih banyak perdebatan dari anggota APBI yang memiliki pandangan berbeda dengan kalimat ini

- APBI akan segera mengadakan FGD terkait dengan DMO ini untuk menganjurkan kebijakan alternatif pada DMO ini.

Rencana Percepatan Implementasi B30

Sebagaimana di informasikan oleh berbagai media massa bahwa Presiden Joko Widodo di Jakarta, Jumat 20 Juli 2018 melakukan rapat terbatas yang membahas tentang pemanfaatan biodiesel dan energi baru terbarukan yang masih belum optimal. Dalam rapat ini Presiden Joko Widodo meminta dilakukan percepatan penggunaan biodiesel dan energi baru terbarukan karena saat ini penggunaan energi fosil masih sangat dominan dari bauran energi nasional sedangkan pemanfaatan energi baru terbarukan masih sangat kecil.

Menindaklanjuti perintah Presiden, maka KESDM melalui Direktorat Energi Baru Terbarukan dan konservasi Energi (EBTKE) pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 mengundang seluruh stakeholder pengguna energi biodiesel untuk mengadakan rapat

yang membahas implementasi B20 pada sektor PSO (*public service obligation*) dan Non PSO dan menyampaikan perintah Presiden bahwa penggunaan B30 akan di percepat yang asalnya akan dimulai per 1 Januari 2020 (sesuai Permen ESDM No 12 tahun 2015), rencananya akan dipercepat menjadi per 1 Januari 2019 (note : akan dilakukan revisi terhadap Permen ESDM No.12 tahun 2015).

Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa pemerintah memberikan mandatori penggunaan Biodiesel melalui Peraturan Menteri No.12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM No.32 tahun 2008 yang mengatur Percepatan dan peningkatan mandatori pemanfaatan BBN (Bahan Bakar Nabati). Dalam Permen ESDM No. 12 tahun 2015 tersebut disebutkan industri pertambangan yang merupakan bagian dari sektor Non PSO (*public service obligation*) wajib menggunakan campuran biodiesel maks. 20% (B20) dimulai pada awal Januari 2016.



Rapat Perdana Pengurus APBI-ICMA Periode 2018-2021



Pada tanggal 2 Juli 2018 di adakan rapat pengurus inti APBI-ICMA perdana yang diadakan setelah terpilih kembali Pandu Sjahrir sebagai Ketua Umum APBI-ICMA. Pada rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum dan dihadiri oleh, antara lain: Kurnia Ariwan (PT Kideco Jaya Agung), Adri Kurnia (PT Kaltim Prima Coal), Ridzza Djumri (PT Berau Coal), Hendri Tan (Adaro Indonesia), Hariyadi Hartadi (PT Tanito Harum), Haryanto Damanik (PT Tobabara Sejahtera Tbk. serta tim sekretariat.

Dalam rapat ini Pengurus APBI-ICMA membahas beberapa hal, yaitu: Struktur Kepengurusan baru, Review & Evaluasi Kepengurusan Periode 2015-2018, Rencana program kerja pengurus baru serta update isu prioritas. Adapun isu yang concern dibahas yaitu: DMO, Kewajiban Penggunaan Asuransi serta RUU Minerba perpanjangan dan Konversi PKP2B menjadi IUPK.

Halal Bi Halal & Perkenalan Pengurus APBI-ICMA Periode 2018-2021



Pada tanggal 12 Juli 2018 di Hotel Westin Jakarta, APBI-ICMA mengadakan acara Halal Bi Halal (HBH) dan Perkenalan Pengurus APBI-ICMA Periode 2018-2021, acara ini dihadiri oleh Bambang Gatot Ariyono (Dirjen Minerba KESDM), Heri Nurzaman (Sekertaris DJMB KESDM),

Sri Raharjo(Direktur Pembinaan Perusahaan Batubara DJMB KESDM), Jonson Pakpahan (Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara) Anggota APBI-ICMA, lintas Asosiasi, Wartawan, dan tamu undangan lainnya.

Perkenalan pengurus ini memberitahukan bahwa stuktur organisai APBI-ICMA sudah terbentuk sebagaimana berikut :



Ketua Umum : Pandu Sjahrir
(PT. Toba Bara Sejahtera Tbk.)



Sekretaris Jendral: Richard Tampi
(PT. Adaro Indonesia)



Deputy Sekretaris Jendral: Haryanto Damanik
(PT. Toba Bara Sejahtera Tbk.)



Bendahara : Sudirdjo Widjaja
(PT. Adimitra Baratama Nusantara)



Ketua 1 : Bramantya Putra
(PT. Indominco Mandiri)

events



Ketua 2 : M. Kurnia Ariawan
(PT. Kideco Jaya Agung)



Ketua 3 : Adri Kurnia
(PT. Kaltim Prima Coal)



Ketua 4 : Ridzza Djumri
(PT. Berau Coal)



Ketua 5 : Hendri Tan
(PT. Adaro Indonesia)



Direktur Eksekutif : Hendra Sinadia
(Professional)

Rapat Revisi UU Pajak & Retribusi Daerah (UU No. 28 Tahun 2009)

Pada tanggal 20 Juli 2018 dilaksanakan Pembahasan Revisi UU No.28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRP) yang bertempat di Kantor KPPOD.

Berdasarkan hasil studi dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD terkait dengan persepsi dan ekspektasi pelaku usaha terkait dengan RUU PDRD tersebut adalah sebagai berikut :

- A. Ketentuan tarif pajak dan retribusi masih berpotensi menghambat pertumbuhan investasi di daerah
- B. Regulasi pajak dan retribusi belum sesuai dengan paradigma pajak dan retribusi daerah
- C. Opsen berpotensi mendistorsi perekonomian daerah karena menambah beban kepada wajib pajak. Oleh karenanya, opsen harus mempertimbangkan beberapa aspek yaitu :
 - 1) Kemampuan pemerintah daerah untuk memungut
 - 2) Administrasi pajak pusat terkait kedudukan/domisili yang dikaitkan dengan kewenangan pemerintah daerah
 - 3) 3. Potensi kehilangan pendapatan di tingkat pusat



Selain itu, penerapan sistem pajak yang masih mempertahankan sistem *closed list* juga didukung oleh para peserta rapat. Sebaiknya sistem *closed list* ini tidak hanya diterapkan untuk jenis dan jumlah rincian objek, namun juga untuk rincian objek pajak untuk menutup ruang pemerintah daerah dalam menentukan objek lain yang berpotensi membebani masyarakat.

Tim KPPOD juga menemukan adanya kekurangan pada implementasi administrasi perpajakan. Hal ini disebabkan karena masih ada administrasi perpajakan yang bersifat manual, persoalan pada kapasitas dan kualitas SDM perpajakan daerah, serta belum optimalnya pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah provinsi terkait dengan regulasi yang ada di kabupaten/kota.

Tim KPPOD akan menunggu hasil rapat dengar pendapat yang akan diselenggarakan di DPR RI terkait dengan revisi UU No. 28 Tahun 2009 dan akan kembali melakukan diskusi dengan mengundang pelaku usaha terkait.

APINDO Member's Gathering

Senin, 30 Juli 2018 APINDO mengadakan *Member's Gathering* dengan Pembahasan Penetapan Sistem *Online Single Submission* (OSS) Dalam Perizinan Berusaha.

Member's Gathering ini diadakan sebagai bentuk sosialisasi Sistem OSS seperti tertuang dalam PP No.24 /2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Acara dipandu oleh Edi Putra Irawadi Deputi Bidang Perdagangan dan Logistik Menko Perekonomian yang menjelaskan tentang berbagai kemudahan yang diberikan sistem Sistem OSS, sehingga sangat membantu para pengusaha dalam membuat dan memperbaharui sebuah izin.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Sistem OSS pada dasarnya menginterkoneksi dan mengintegrasikan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat, PTSP di daerah yang menggunakan sistem Si Cantik Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta sistem dari berbagai kementerian dan lembaga penerbit perizinan termasuk sistem Indonesia National Singel Window (INSW).

Diskusi Dengan Asosiasi Semen Indonesia



Pada tanggal 30 Juli 2018, Hendra Sinadia (Direktur Eksekutif APBI-ICMA) bersamadengantimPengurusdariAspindo-IMSA (Asosiasi Perusahaan Jasa Usaha Pertambangan Indonesia) melakukan diskusi dengan pihak PT Semen Indonesia membahas mengenai mekanisme tepat untuk jam inas pasokan batubara ke industri semen dengan teknologi yang dapat membantu industri semen melakukan efisiensi usaha. Pihak Semen Indonesia akan selanjutnya berkoordinasi dengan Asosiasi Semen Indonesia untuk melakukan pertemuan lebih lanjut dengan pihak APBI membahas pasokan batubara ke industri semen di tanah air.

Pertemuan Ke-8 CAMCF



Pada tanggal 9 sampai tanggal 11 Juli 2018, Hendra Sinadia hadir dalam pertemuan ke-8 China-ASEAN Mining Cooperation Forum (CAMCF) yang diadakan di Bangkok, Thailand. Untuk membangun hubungan kerjasama yang lebih erat antara negara-negara dan mencapai perkembangan bersama, pertemuan ini akan membahas beberapa subjek berikut ini:

- Briefing pada agenda 2017 CAMCF dan kursus pelatihan ke-6 China-ASEAN Mining Personnel Exchange & Training Center (CAMPTEC).
- Briefing dan diskusi tentang rencana keseluruhan 2018 CAMCF, rencana pendaftaran dan jadwal kursus dari program pelatihan ke-7 dari CAMPTEC, promosi platform layanan informasi pertambangan China ASEAN.
- Diskusi tentang kerja sama proyek pertambangan.

Diskusi Ilmiah BKKP II



Pada tanggal 12 Juli 2018 Hendra (Direktur Eksekutif APBI-ICMA) menjadi pembicara pada Acara

Diskusi Ilmiah BKKP II pada Rangkaian Acara INA-CHEM 2018 yang diadakan di JIEXPO Kemayoran Jakarta. Acara ini bertemakan tentang “Percepatan Teknologi Gasifikasi Batubara di Indonesia”. Tema ini merupakan salah satu tema yang mulai ramai diperbicarakan di Indonesia. Pak Hendra memaparkan beberapa paparannya tentang teknologi gasifikasi batubara di Indonesia ini. Dalam paparannya Pak Hendra terlebih dahulu memaparkan tentang kebutuhan batubara di Indonesia, cadangan batubara Indonesia, lalu dilanjutkan dengan dasar hukum tentang gasifikasi batubara di Indonesia, usulan usulan APBI dalam menanggapi penambahan nilai batubara ini, serta memberikan paparan contoh perusahaan anggota APBI-ICMA yang sudah menjalani proses gasifikasi/hilirisasi batubara ini seperti (PT. Bukit Asam, PT. Bumi Resources, PT. Medco)

Workshop Pra-Validasi Tim Pelaksana EITI



Pada tanggal 18 Juli 2018 EITI Indonesia mengadakan *workshop* tentang pra validasi Tim Pelaksana EITI di Hotel Morrissey Jakarta. Sebagai salah satu MSG, APBI yang diwakili oleh Hendra Sinadia (Direktur Eksekutif APBI) dan Marvin Gilbert (Secretariat APBI) mengikuti acara *workshop* tersebut.

Sebagai pengantar, EITI atau *Extractive Industries Transparency Initiative* adalah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif (termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batubara). Di Indonesia, EITI ini berada dibawah Kementerian Koordinator Perekonomian Indonesia, dan EITI ini sudah memiliki dasar hukum berupa PP No. 26 Tahun 2010.

Workshop ini dilakukan untuk memvalidasi peran EITI Indonesia ini apakah sudah sesuai dengan ketentuan EITI International atau tidak. Maka itu hadir pula dari berbagai kalangan yang membatu EITI ini seperti perwakilan dari Pemerintah, perwakilan dari CSO, MSG. Dan validasi ini langsung dipimpin oleh Gay Alessandra Ordenes (Regional Director EITI International)

Kunjungan Tim Liaison BI



Pada tanggal 25 Juli 2018 APBI-ICMA mendapat kunjungan dari Tim Bank Indonesia sehubungan dengan partisipasi APBI-ICMA dalam pelaksanaan kegiatan Liaison 2017, maka Tim Bank Indonesia ingin mewawancarai APBI mengenai kondisi aktual dan prospek dunia usaha pertambangan khususnya batubara, yang dimana informasi dalam wawancara ini diperlukan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan.

Pada kesempatan ini Hendra (Direktur Eksekutif APBI-ICMA) menyampaikan beberapa hal untuk memberikan masukan data terbaru bagi Tim Bank Indonesia ini, diantaranya seperti pemaparan tentang produksi batubara baik untuk ekspor dan domestik, permintaan pasar, harga jual batubara, sumber pembiayaan tambang batubara, kompetitor pasar batubara nasional, dan lain sebagainya.

Mining Tech Seminar & Forum Group Discussion



Pada tanggal 24 Juli 2018 di Balikpapan , Kalimantan Timur. Petromindo mengadakan acara dengan Shell Indonesia, acara ini mengambil tema “Mining Tech 2018”. Acara tahunan ini diadakan sebagai bentuk kontribusi Shell Indonesia terhadap dunia pertambangan Indonesia.

Dalam Acara tersebut, APBI yang diwakilkan oleh Hendra Sinadia berkesempatan untuk memberikan paparannya dengan mengambil

tema yang berjudul “The Future of Mining Industry in Indonesia” diantaranya seperti pemaparan tentang produksi batubara baik untuk ekspor dan domestik, permintaan pasar, harga jual batubara, sumber pembiayaan tambang batubara, kompetitor pasar batubara nasional , dan lain sebagainya.



APBI-ICMA

ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA

INDONESIAN COAL MINING ASSOCIATION

CONTACT US

ADDRESS

Menara Kuningan Building ,
1st Floor, Suite A, M & N
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7Kav. 5
Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA

PHONE & EMAIL

secretariat@apbi-icma.org
+62-21 3001 5935
+62-21 3001 2477
www.apbi-icma.org

SOCIAL MEDIA

Twitter : @APBI_ICMA
Youtube : APBI ICMA
Instagram : apbi.icma